



Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam
P-ISSN : 2621-0312
E-ISSN : 2657-1560
Vol. 5, No. 1 Tahun 2022
DOI : 10.21043/politea.v5i1.12671

Kiai sebagai Kekuatan Politik dalam Pemilihan Presiden 2019 di Jawa Timur

Mukari
Universitas Darul Ulum Jombang, Jawa Timur, Indonesia
mikrawh@gmail.com

Moch. Mubarak Muharam
FISH, Universitas Negeri Surabaya , Jawa Timur, Indonesia
mochmuharam@unesa.ac.id

Mustiqowati Ummul Fithriyyah
Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, Indonesia
mustiqowati@uin-suska.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the political power of the kiai in the 2019 Presidential Election in East Java Province, Indonesia. The research method we use is a qualitative method with a case study type. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews to obtain primary data and literature review through books and journals. How the power and actions of kiai in the 2019 presidential election are the focus of this journal research. The theory of political elites from Vilfredo Pareto and Gaetano Mosca becomes the basis for the analysis of this journal. The results of this study see that the kiai have succeeded in winning the pair Joko Widodo (Jokowi) and Ma'ruf Amin in the 2019 presidential election and can minimize the existence of identity politics in East Java. This study concludes that this success is due to the existence of the kiai as an elite in society. With moral integrity, the depth of religious knowledge and concern for the problems that exist in society become a separate political force for the kiai.

Keywords: kiai, political power, general election, elite

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis kekuatan politik kiai dalam Pemilihan Presiden 2019 di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Metode penelitian yang kami gunakan yakni metode kualitatif dengan tipe studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam untuk mendapatkan data primer serta kajian pustaka melalui buku dan jurnal. Bagaimana kekuatan dan aksi-aksi kiai dalam Pilpres 2019 menjadi fokus dalam riset jurnal ini. Teori elit politik dari Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca menjadi pijakan dalam analisis jurnal ini. Hasil Penelitian ini melihat bahwa kiai telah berhasil memenangkan pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 dan dapat meminimalisir adanya politik identitas di Jawa Timur. Studi ini menyimpulkan bahwa keberhasilan ini disebabkan oleh keberadaan kiai sebagai elit dalam masyarakat. Dengan integritas moral, kedalaman ilmu agama dan kepedulian pada masalah yang ada di masyarakat menjadi kekuatan politik tersendiri bagi kiai.

Kata kunci: Kiai, political power, general election, elite

Pendahuluan

Kiai merupakan representasi simbolik keagamaan, karenanya kiai memiliki pengaruh besar membangun bangsa. Pengaruh didapatkan, karena kiai dapat menggerakkan santri (warga) untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan politik. Begitu kuatnya peran dan pengaruh kiai di masyarakat, menjadikan tokoh kiai sebagai sosok yang perlu dipertimbangkan bagi pihak yang tengah mencari dukungan di waktu-waktu pemilihan kepala daerah, wakil rakyat bahkan pemilihan presiden, terutama di pedesaan dan masyarakat tradisional.

Pada pemilu 2019 keberadaan kiai begitu penting untuk melawan politik identitas (politik yang menggunakan isu-isu agama) kembali di uji dalam situasi dimana di masyarakat terjadi pembelahan yang luar biasa, pemilu yang diwarnai dengan isu SARA, *black campaign* yang begitu masif. Artikel ini berusaha menganalisa tentang kekuatan kiai di Jawa Timur pada pemilu 2019 yaitu kiai yang mendukung pasangan calon (paslon) 01, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, dimana paslon urutan 01 itu di Jawa Timur memperoleh suara terbanyak sebesar 16.231.668. Perolehan suara tersebut adalah kedua terbesar setelah Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah sebesar 16.825.511, yang diperoleh Pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Politik identitas tersebut, mengakibatkan pembelahan menjadi dua kubu, antara kubu yang pro dan kontra terhadap Jokowi (Jokowi). Jokowi mendapat penyerangan isu mengenai Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA), diantaranya seperti anggapan bahwa Joko Widodo sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), antek-asing (Pro-Cina), pemimpin yang anti-islam, dan telah melakukan kriminalisasi terhadap ulama. Selain itu persoalan adanya tenaga kerja asing di Indonesia, yang secara masif dan intens dilakukan oleh pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dalam pemenangan calon tertentu saat pemilihan presiden 2019, menjadi isu kampanye yang dibuat untuk menurunkan elektabilitas. Dari hasil survei tersebut menunjukkan angka “percaya” yang lebih besar terhadap masuknya tenaga kerja asing yang berlebihan ke Indonesia dibanding angka dari “tidak percaya”. Meskipun selisih 13.9 persen, tapi angka 25.9 persen dari ketidakpercayaan masyarakat merupakan angka yang cukup besar (HasilSurvey Charta Politik).

Politik identitas marak terjadi di Indonesia pasca berakhirnya pemerintahan Orde Baru, dan salah satu contoh politik yang menyita perhatian publik ini adalah Aksi Bela Islam pada 2 Desember 2016 (M Mietzner, 2018). Ada beberapa penelitian tentang keterlibatan dalam politik dan pemerintahan, antara lain dari Fealy & Bush (Fealy & Bush, 2014) dan Laila (Alfirdaus, 2014). Fealy & Bush menyatakan bahwa pengaruh kiai dalam politik semakin berkurang seiring dengan adanya demokrasi dan keterbukaan politik di Indonesia. Sementara itu, Laila menyatakan bahwa keterlibatan kiai dalam politik dan pemerintahan tidak selalu positif, karena kiai lebih cocok menjadi pemuka agama dan penjaga moral. Dalam penelitiannya tersebut, Laila melihat bahwa keberadaan kiai di pemerintahan sebagai kepala daerah, ternyata membuat kebijakan yang dimunculkan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Dalam menjalankan birokrasi, kepemimpinan kiai tidak menghasilkan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur yang memadai.

Penelitian ini berbeda dengan apa yang dikatakan Fealy & Bush dan Laila, karena penelitian ini melihat bahwa pengaruh politik masih kuat dan kehadiran mereka dalam politik positif, karena mencegah terjadinya politik intoleran dan juga politik yang

menyebarkan kebohongan. Penelitian ini mencoba menganalisis kekuatan politik kiai dalam Pilpres 2019 di Jawa Timur untuk memenangkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Pasangan No. 2) dan kemampuan mereka untuk melawan politik identitas dalam pemilihan presiden.

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian kualitatif dengan menggunakan analisa teori elit politik dari Pareto. Dalam penelitian kualitatif ini, wawancara dianggap sebagai interaksi yang pembetukannya dibantu oleh peneliti dan subyek. Dalam analisisnya, pewawancara dan subyek dianggap setara. Wawancara dilakukan dengan cara terstruktur, yaitu sebuah wawancara yang menggunakan pertanyaan yang sama pada setiap informasn. Wawancara dilakukan secara berulang-ulang, setiap wawancara dilakukan dalam upaya melakukan pengulangan pertanyaan terhadap pertanyaan yang dimunculkan oleh sebelumnya.

Pengumpulan data primer dari informan, dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara secara mendalam terhadap 5 informan yang berasal dari beberapa unsur-kiai, santri, Jaringan Kiai Santi Nusantara (JKSN) dan Tim Pemenangan Daerah (TPD) dari Pasangan Jokowi- Ma'ruf Amin pada Februari-Juni 2021. Dari wawancara mendalam diperoleh informasi tentang kekuatan politik kiai pada pemilihan presiden 2019 di Jawa Timur. Data yang telah dikumpulkan dari informan, kemudian dianalisis dengan mempertimbangkan tiga proses yaitu reduksi data, display/penyajian data dan verifikasi/kesimpulan (Stake 2011).

Hasil dan Pembahasan

Kiai

Kebiasaan yang terjadi di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, seseorang yang mempunyai kedalمام ilmu Agama Islam, mendapatkan penghormatan luar biasa dan ia dapat menjadi elit di masyarakat. Orang yang mempunyai ilmu agama tersebut disebut sebagai Ulama. Selain mempunyai kedalaman ilmu agama, ulama adalah orang

yang mengajarkan doktrin-doktrin keagamaan dan memelihara amalan-amalan keagamaan ortodoks di kalangan umat Islam(Turmudi, 2004).

Banyak orang yang menyamakan bahwa ulama adalah sebutan lain dari kiai. Tetapi dikalangan tertentu, khususnya bagi warga Nahdlatul Ulama (NU)-organisasi yang didirikan oleh para kiai untuk melindungi ajaran-ajaran kiai dari serangan pihak lain- untuk menjadi kiai tidak cukup hanya bermodalkan kedalaman ilmu agama, tetapi ia harus mempunyai atau menjadi pendidik di Pondok Pesantren. Pondok Pesantren adalah tempat menetap bagi santri untuk mendapatkan ilmu agama (Pribadi, 2014). Di Pondok Pesantren, santri tidak hanya mendapatkan ilmu agama, tetapi ia juga mendapatkan pelajaran hidup dari kiai (Tan, 2014). Di pondok pesantren, para santri dilatih untuk hidup dengan penuh kesederhanaan dan melaksanakan tindakan yang terpuji (Setiyani, 2020).

Pada dasarnya memang sebutan kiai dari satu daerah dengan daerah lain berbeda-beda. Kategorisasi dan standarisasi dari masyarakat yang menentukan siapa orang yang pantas dianggap kiai dan bukan kiai. Namun demikian, perbedaan kategorisasi dan standarisasi tersebut tetap saja mengandung inti bahwa status kiai adalah status yang diasosiasikan dengan keilmuan keagamaan dan dan menjadi panutan dalam hal teologis oleh masyarakat yang ada di tempat tersebut.

Seseorang yang dianggap sebagai kiai di satu daerah, tidak dikategorikan sebagai kiai di daerah lain, namun hanya sebagai ustadz-tokoh agama yang tingkatannya lebih rendah dari kiai. Namun dalam dinamikanya, ada beberapa pengecualian bahwa seorang kiai bisa saja memiliki pengaruh lintas daerah. Selain karena pengetahuan keislamannya yang diakui oleh banyak orang, ketokohan seorang kiai dilihat dari nasab (garis keturunan) yang dimiliki (Turmudi, 2004).

Dengan adanya pondok pesantren itulah kiai mendapatkan patronasenya (pola dan suri tauladan yang dijadikan acuan) bukan hanya oleh santrinya melainkan juga oleh orang tua santri tersebut dan juga masyarakat yang ada di luar desa atau kotanya

sendiri (Ma'arif, 2010). Ma'arif dalam penelitiannya mengatakan bahwa di dalam pesantren, kiai memang memiliki otoritas sebagai hierarki kekuasaan satu-satunya kiai sebagai penyelamat santrinya agar terhindar dari hal-hal yang memungkinkan terjerumus ke arah negatif atau melenceng pada norma-norma agama. Meskipun secara teoritis dalam mendapatkan modal sosial, kiai banyak dipengaruhi oleh keberadaan pondok pesantren dan seperangkat santri-santri yang menyertainya, namun secara historis pondok pesantren tersebut memiliki modal politik bukan hanya karena fungsinya sebagai lembaga pendidikan, namun juga merupakan alternatif arus pengenalan jati diri dan perlawanan masyarakat Indonesia pada masa perjuangan melawan penjajahan pada zaman kolonialisme di Indonesia (Chalik, 2016) .

Pada masanya dulu, dan mungkin sampai saat ini, kiai dan pondok pesantren bukan hanya sebagai institusi penjaga tradisi, namun juga pemberi nilai (judgment) tentang apa yang menjadi bagian dari “kita” dan apa yang telah menjadi bagian dari “mereka”. Selain itu, kiai dan pondok pesantren dalam dinamika sosiologisnya memiliki posisi yang simbolis dan strategis. Dalam konteks masyarakat pedesaan, kiai dan pesantren bukan saja bagian belaka dari kesucian, melainkan juga menempati posisi inti dalam struktur kesucian itu sendiri. Semua itu berakar dari kemampuan kiai dan pondok pesantren menguasai dunia agama, ditambah dengan tipikal masyarakat yang memang belum terlalu memiliki bekal pengetahuan teknikal dan empiris, sehingga ketergantungan masyarakat terhadap kiai begitu tinggi.

Demikianlah penjelasan historis dan alasan logis bagaimana posisi kiai dan pondok pesantren serta santrinya di masyarakat, sehingga dengan posisi itu kiai memiliki modal-modal sosial yang sangat diperhitungkan dalam dunia perpolitikan. Turmudi mengatakan setidaknya ada empat jenis kiai diantaranya, pertama, Kiai Pondok. Jenis kiai semacam ini memusatkan perhatiannya pada pendidikan pondok pesantren, pendidikan demi peningkatan sumber daya manusia santri. Kedua, Kiai Tarekat. Kiai Tarekat merupakan tokoh agama yang memfokuskan diri pada kegiatan membangun batin (dunia hati) umat Islam. Kiai jenis ini mempunyai pengikut banyak. Ketiga, Kiai Politik. Kiai ini lebih fokus pada politik praktis, baik sebagai pengurus

parpol maupun sebagai juru kampanye untuk partai politik dan kandidat tertentu. Keempat, Kiai Panggung. Kiai ini memusatkan pada kegiatan dakwah untuk mengembangkan ajaran Islam, dan pengikutnya tersebar di beberapa daerah.

Berdasarkan kriteria diatas memang tidak bisa menilai secara langsung sosok kiai dengan jenis tertentu. karena realitasnya sekarang ini adalah Kiai tidak hanya memiliki satu kapasitas. Baik itu Kiai Pesantren, Kiai Tarekat, Kiai Politik ataupun Kiai panggung, bahwasanya realita di masyarakat adalah seringkali Kiai Tarekat merangkap pula sebagai Kiai Pesantren dan Kiai Politik (Turmudi, 2004)

Dalam perkembangannya, Kiai-Kiai tersebut kemudian terkumpul dalam sebuah organisasi ortodoks yang bernama Nahdlatul Ulama' (NU) dimana anggotanya kemudian disebut sebagai Nahdliyin. Kebanyakan anggota dan pendukung organisasi ini memang berasal dari daerah-daerah pedesaan. Maka dari itu tidak heran jika kemudian dalam konstelasi perpolitikan organisasi ini banyak dilirik sebagai komoditas politik (Turmudi, 2004).

Lebih jelas lagi, Turmudi menjelaskan bahwa sejak munculnya NU yang pada awalnya sebagai organisasi politik, membuat persinggungan antara Kiai dan pesantren dengan dunia politik menjadi lebih vulgar. Dengan demikian, maka dunia pesantren pun lebih mudah terkena penetrasi politik dan kemudian banyak politisi NU yang memanfaatkan pengikut-pengikut setia mereka untuk dijadikan lahan subur memanen dukungan suara.

Kiai dalam Pemilihan Presiden 2019

Pemilihan Presiden (Pilpres) Indonesia 2019 menjadi pembuktian dari pengaruh politik kiai di Provinsi Jawa Timur. Pada pilpres tersebut, kiai, sebagai pemimpin agama yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (Organisasi Islam terbesar di Indonesia), menghadapi tantangan dengan adanya politik identitas, yaitu sebuah gerakan atau pemikiran yang menggunakan symbol dan narasi agama untuk kepentingan kekuasaan. Politik identitas tersebut telah membela masyarakat menjadi 2

kubu yang berlawanan, yaitu pro dan kontra Joko Widodo (Jokowi), incumbent dalam pilpres 2019.

Sebagian besar kiai tidak menghendaki politik identitas berkembang kuat di Jawa Timur. Perlawanannya terhadap politik identitas, sama artinya dengan pemihakan pada Jokowi dalam pilpres, karena narasi dan simbol-simbol agama yang dimunculkan oleh kelompok Islamisme adalah untuk mempertanyakan kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden Indonesia pada periode 2014-2019. Selain mempertanyakan kualitas kepemimpinan, kelompok yang tidak menyukai pemerintahan juga selalu mempertanyakan latar belakang Jokowi yang dianggap tidak sesuai dengan Islam.

Adanya politik identitas yang menguat, menyebabkan tidak mudah bagi kiai untuk memenangkan Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019-2024. Selain itu ada beberapa hal yang membuat perjuangan kiai menjadi berat di Jawa Timur, pertama, pengaruh politik kiai mulai menurun di beberapa kabupaten. Menurunnya karisma kiai dapat dilihat pada kemenangan pasangan Achmad Syafi'i- Kholil Asy'ari sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan pada 2013. Pasangan tersebut kurang mendapat dukungan dari kiai, sedangkan Kabupaten Pamekasan adalah daerah dengan kepatuhan warganya terhadap kiai sangat tinggi.

Kedua, para kiai mengalami "perpecahan" politik dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2018. Pada Pilgub itu muncul dua kubu, yaitu poros Lirboyo yang mendukung Gus Ipul-Puti Soekarno dan poros Tebuireng yang mendukung Khofifah-Emil Dardak. Poros Lirboyo adalah gabungan kiai yang dipimpin oleh kiai dari Pondok Pesantren Lirboyo dan para kiai tersebut sebagian besar mempunyai jabatan penting di Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur. Sedangkan Poros Tebu Ireng adalah kumpulan kiai yang dipimpin oleh kiai dari Pondok Pesantren Tebu Ireng dan para kiai tersebut tidak mempunyai posisi penting di PWNU Jawa Timur. Pada akhirnya, pasangan yang didukung Poros Tebu Ireng dapat memenangkan Pilgub Jatim. Walaupun terjadi perbedaan politik dalam Pilgub Jatim,

para kiai yang tergabung dalam 2 poros, yaitu Lirboyo dan Tebu Ireng memberikan dukungan yang sama, yaitu kepada Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin Pada Pilpres 2019.

Penurunan pengaruh politik kiai di beberapa daerah serta adanya perbedaan politik antara kiai pada Pilgub Jatim 2018, tidak membuat posisi kiai menjadi tidak penting dalam politik. Sebaliknya keberadaan kiai tetap dibutuhkan oleh banyak pihak, dalam upaya untuk merealisasikan kepentingan politik. Pada pilpres 2014, kiai dibutuhkan untuk memenangkan kontestasi oleh kedua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), khususnya oleh pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin menempatkan kiai sebagai aktor utama untuk mendapatkan suara pemilih di Jawa Timur. Sebagaimana yang disampaikan oleh Otman Ralibi, Tim Kampanye Daerah (TKD) Jawa Timur:

“Kalau kita lihat di Jawa Timur itu mengingat calon wakil presidennya itu dari Nahdlatul Ulama, maka tentu saja peran NU di Jawa Timur mendapat porsi peran yang lebih besar. Bagi TKD bekerja sama dengan NU sangat efektif karena memang NU besar di Jawa Timur, dia basis di Jawa Timur, oleh karena itu peran itu harus didorong untuk memenangkan Jokowi dan Kiai Ma'ruf. Jadi NU dengan segala elemennya mulai dari pesantren, kelompok pengajiannya itu didorong dan bisa dimanfaatkan” (wawancara pada 15 Februari 2021 di Surabaya, Jawa Timur).

Keberadaan Ma'ruf Amin sebagai cawapres dari Jokowi menjadi salah satu alasan dari para kiai (NU) memberikan dukungan kepada incumbent dalam pilpres 2019. Latar belakang Amin sebagai Ketua Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), menjadi daya Tarik bagi para kiai untuk mendukungnya. Selain itu Amin adalah ketua Majelis Ulama Indonesia, serta cicit dari Syaikh Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani, ulama asal Banten yang pernah menjadi Imam Besar Masjidil Haram. Hal itu yang membuat Amin mempunyai karisma, sehingga menjadikannya dihormati oleh para kiai.

Selain karena keberadaannya Ma'ruf Amin sebagai cawapres, ada beberapa hal yang membuat para kiai memberikan dukungan pada Jokowi. Pertama, Jokowi dinilai telah berhasil memimpin Indonesia pada periode pertamanya sebagai

presiden. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Zahrul Azhar As'ad, Sekretaris Jenderal Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN), sebagai berikut:

“Ada beberapa faktor kenapa kita harus mendukung pak Jokowi, karena beliau memang terlihat berhasil dalam melaksanakan pemerintahannya, dalam hal infrastruktur dan juga memberkan value terhadap pemerintahan yang humanis, yang selama ini kaku, dan setelah dipegang pak Jokowi menjadi tidak kaku, dan faktor Kiai Ma'ruf, semakin semangat untuk ada di 01.” (wawancara pada 7 Maret 2021 di Jombang, Jawa Timur)

Kedua, ada kekuatiran dari para kiai, apabila pasangan Jokowi-Ma'aruf Amin tidak terpilih sebagai presiden dan wapres untuk periode 2019-2024, dikuatirkan kelompok Islamisme dan juga kelompok Islam yang tidak toleran akan lebih mudah untuk menyebarkan ajaran dan pengaruhnya. Bagi kiai, keberadaan kelompok Islam intoleran mempunyai potensi untuk menggoyahkan keutuhan NKRI. Dalam konteks tersebut, kiai menyadari bahwa pilpres 2019 tidak sekedar kegiatan politik untuk memilih pemimpin negara, tetapi lebih dari itu adalah untuk menyelamatkan masa depan Indonesia. Dalam sudut pandang pendukung Jokowi ataupun kiai, eksistensi kelompok Islam Intoleran dapat mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila, karena mereka mempunyai keinginan untuk mendirikan Negara Islam atau Khilafah (Marcus Mietzner & Muhtadi, 2020). Para kiai menyadari hanya mereka yang bisa melakukan perlawanan terhadap gerakan dari kelompok Islam Intoleran. Dalam Hal hal tersebut, Otman Ralibi, Tim Kampanye Daerah (TKD) Jawa Timur menyatakan sebagai berikut:

“Oleh karena itu, peran Kiai sangat diperlukan. Karena ada upaya untuk mengancam keutuhan negara. Jika ada satu pihak yang memaksa kehendaknya untuk membentuk negara khilafah dan mengganti dasar negara itu akan sulit untuk memperjuangkan NKRI, karena itu akan terpecah belah. Itu yang mereka inginkan. Oleh karena itu peran NU dalam menjaga keutuhan NKRI sangat diperlukan. Di Jawa Timur kita memenangkan pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf juga sekaligus memenangkan Indonesia sebagai negara.” (wawancara pada 15 Februari 2021 di Surabaya).

Ketiga, kiai juga mempunyai kekuatiran bila kelompok Islam Intoleran ataupun juga Islamisme menyebarkan pengaruh, ajaran dan prinsip yang dimiliki NU menghadapi tantangan. Dalam beberapa tahun, khususnya setelah kemunculan ‘Kelompok Islam 212’, otoritas yang dipunyai oleh NU dalam bidang agama, memang mendapatkan tantangan dari Kelompok Islamisme (Muharam & Marijan, 2020). Kelompok Islamisme berpotensi mendapatkan simpati dari “umat mengambang” yang dimiliki oleh NU dan juga Muhammadiyah (Hadiz, 2019).

Ada beberapa prinsip dari NU yang selama ini menjadi pegangannya (Ismail, 2011). Pertama, tawassuth, sebuah keinginan untuk menempatkan dirinya pada posisi di tengah, tidak terlalu ekstrem dalam melihat sebuah persoalan. Kedua, I’tidal, yaitu kehendak dan sikap untuk selalu mewujudkan keadilan. Dalam hal tersebut, NU berusaha selalu proporsional dalam melihat fenomena sosial dan politik berdasarkan penafsiran agama. Ketiga, NU dan para kiai menginginkan adanya keseimbangan (tawazzun) dalam menjalankan kehidupan agama serta mengerjakan persoalan dunia. Keempat, tasamuh, prinsip ini adalah keinginan atau sikap untuk selalu toleransi terhadap sebuah perbedaan. Karena menjalankan prinsip-prinsip tersebut memberikan arti bahwa NU melakukan praktik keagamaan yang moderat, inklusif dan akomodatif yang berkembang di masyarakat (Roy Purwanto et al., 2019),(Ridwan et al., 2019)

Kelompok Islamisme, walaupun jumlah sedikit di Jawa Timur, tetapi aktivitas politik tidak berhenti dalam mempengaruhi pemilih, khususnya melalui media sosial. Tidak saja Kelompok Islamisme, pihak yang tidak menyukai Jokowi juga aktif membikin opini tentang kepribadian Jokowi. Menurut Roziqi, Ketua Jaringan Kiai Santri (JKSN) Jawa Timur, opini-opini yang dibuat oleh pihak yang anti Jokowi, seringkali menyesatkan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Roziqi, sebagai berikut:

“mereka sejak awal sering membuat berita hoax, selalu menuduh pak Jokowi adalah Partai Komunis Indonesia, pak Jokowi nggak sholat, jadi mereka caranya menggunakan isu yang hot ini luar biasa. tiap saat kontennya ganti-ganti. memang hebat teknik medianya., anak-anak golongan aliran keras itu pinter-pinter dan mereka militannya luar biasa” (wawancara pada 17 April 2021 di Surabaya).

Pihak Tim Kampanye Daerah (TKD) dari Pasangan Jokowi-Ma'aruf Amin sendiri menyadari bahwa dalam mengatasi berita bohong tersebut mereka selalu terlambat. Berita bohong yang berupa konten negatif tersebut selalu sampai di tangan masyarakat terlebih dahulu, sehingga mereka kalah start. Walaupun pihak TKD sudah mengklarifikasi, itupun tidak membuat masyarakat langsung percaya begitu saja. Berita Bohong atau hoax yang dikeluarkan oleh pihak lain begitu dikemas seakan-akan itu merupakan sebuah kebenaran. Bahkan untuk sekelas tokoh masyarakat yang menyandang guru besar (professor) pun dibuat percaya tentang berita bohong yang menyatakan Jokowi sebagai keluarga Partai Komunis Indonesia, dan memeckerjakan banyak TKA di Indonesia sehingga tidak adanya lahan pekerjaan untuk warga negara sendiri.. Karena itu, peran kiai untuk menetralisasi berita bohong (hoax) menjadi diperlukan. Sebagaimana dinyatakan oleh Otman Ralibi, Tim Kampanye Daerah (TKD) Jawa Timur

“Peran Kiai itu kita tujukan ke semua orang, Kiai memang untuk masyarakat dan tidak bisa dibatasi hanya untuk kalangan tertentu. peran Kiai itu juga sama seperti sebelum pilpres, tidak dikurangi. ya peran Kiai itu dalam berpesan. hanya saja mereka lebih intens bertemu masyarakat. untuk terjun ke masyarakat langsung. “banyak tidak hanya santri saja, kelompok millennial, di luar itu banyak, dari berbagai komunitas, dan kalangan profesional” (wawancara pada 15 Februari 2021).

Kiai memang mempunyai kelebihan dibandingkan kekuatan politik lainnya adalah aktivitasnya yang dapat bertemu dengan setiap kelompok masyarakat. Sehingga para tokoh agama yang merupakan pengelola pondok pesantren tersebut dapat mempengaruhi banyak orang, khususnya para santri, yang jumlahnya sangat banyak di Jawa Timur. Para santri, sebagai orang yang mendapatkan ilmu agama dari kiai, adalah kelompok yang lebih terlihat diam di dalam ruang publik dan media sosial. Tetapi dengan jumlah yang banyak, keberadaan kelompok tersebut tidak bisa diremehkan. Para santri tersebut mempunyai kepatuhan luar biasa terhadap kiai. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Anshori, seorang santri sebagai berikut:

“Apa yang dikatakan oleh kiai, saya anggap sebagai hal yang benar, saya akan mengikutinya. Mengikuti perintah kiai itu, akan memberikan keberkahan bagi

saya. Walaupun tidak mendapatkan keuntungan di dunia, bisa mendapat keuntungan di akhirat. Saya selama ini mendapat ilmu agama dari kiai, maka wajib bagi saya untuk menjalankan perintah kiai.(wawancara pada 20 Mei 2021).

Sebagian santri memiliki status generasi milenial. Santri-santri ini bergerak untuk upaya pemenangan dengan melakukan pendekatan melalui perbincangan-perbincangan kecil sehari-hari ataupun dari mulut ke mulut. Sehingga tidak nampak bahwa mereka sedang melakukan kampanye. Sementara itu, mantan santri juga digunakan untuk melakukan upaya pemenangan dengan memainkan posisi yang sedang mereka peroleh setelah menjadi mantan santri.

Santri sendiri tidak hanya beraktivitas di bidang agama, mereka telah menyebar di berbagai bidang, seperti menjadi pengusaha, bekerja instansi pemerintah dan perusahaan serta menjadi guru di sekolah. Di tempat-tempat komunitas barunya itu, para santri dapat mempengaruhi orang lain untuk memilih pasangan Jokowi-Ma'aruf Amien. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hanan Madjid, salah seorang kiai di Jawa Timur:

“ ini yang dimaksud bukan santri-santri yang ada di dalam pondok pesantren , melainkan ‘mantan’ santri yang misalnya berprofesi sebagai pengusaha, tokoh-tokoh masyarakat, kita ajak untuk menjaring, mereka-mereka yang membentuk komunitas, yang jadi pengusaha tolong anak buahnya dikoordinir untuk mendukung 01 (Jokowi-Ma'aruf Amin-catatan dari penulis).” (wawancara pada 18 Juni 2021 di Jombang, Jawa Timur).

Selain mempunyai pengikut banyak di kalangan santri, salah satu kelebihan dari kiai dalam melakukan komunikasi kepada masyarakat atau pemilih adalah pendekatannya yang santun dan tidak membikin kegaduhan. Kiai menyampaikan pesan ke kalayak luas sesuai dengan kenyataan dan data yang sebenar-benarnya. Adapun pesan yang mereka sampaikan dari pertemuan-pertemuan dengan masyarakat adalah memamerkan prestasi Joko Widodo sebagai kandidat. Prestasi yang diceritakan oleh Kiai-Kiai itu banyak didominasi oleh topik pembangunan infrastruktur seperti jalan tol. Lalu mereka juga menceritakan tentang ibadah Joko Widodo. Bagaimana sholatnya, bagaimana dia pergi ke Mekah dan masuk ke dalam Baitullah. Selain itu, mereka juga

memberi informasi ada kelompok Islam pendukung khilafah di kubu Prabowo Subianto.

Dalam hal ini, Roziqi, Ketua Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) Jawa Timur:

“Kita itu banyak motivasi itu tentang milih iku calon yang bagus karena yang menentukan masa depan. Bukan ahlussunah, yang merupakan ajaran NU, berkembang bebas atau ndak, ini yang kita tekankan, supaya mereka paham yakin, karena mereka sendiri tidak menjual program dan membantuk image yang baik bagi 02, tapi malah menjelek-jelekan paslon 01. Kalau kiai kan nggak menjelekan 02. Kiai menyampaikan ini loh 01 sembahyang apik, sudah berpengalaman, jalan tol dulu masih ini sampe situ, tapi sekarang jalan tol sudah dimana-mana meluas.” (wawancara pada 17 April 2021 di Surabaya)“.

Pendekatan dan kampanye yang dilakukan oleh para kiai untuk memenangkan Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, oleh sebagian orang dinilai berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pendukung dan simpatisan Pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Mien Uno. Menurut Roziqi, Sekretaris JKSN Jawa Timur, menilai bahwa simpatisan dari Pasangan No. 2 tersebut cenderung membuat narasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, seperti menyatakan bahwa bila Jokowi terpilih kembali, kegiatan adzan (tanda waktu Sholat bagi orang Islam) tidak diperbolehkan, aktivitas perzinaan akan diperbolehkan dan Jokowi dituduh sebagai keturunan dari Partai Komunis Indonesia (PKI) (wawancara pada 17 April 2021 di Surabaya).

Selain dengan penuh kedamaian, kampanye yang dilakukan kampanye dilakukan oleh para kiai dengan memperhatikan aturan yang berlaku. Menurut Otman Ralibi, Tim Kampanye Daerah Jawa Timur, dalam kampanyenya, para Kiai berusaha untuk menghindari tindakan yang melanggar aturan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Otman Ralibi, sebagai berikut:

“Salah satunya pengajian dakwah seperti yang biasa dilakukan. memang ada aturan kampanye yang melarang mereka untuk kampanye di Masjid. tapi kalau pengajian di luar masjid, seperti dirumah atau ditempat-tempat tertentu yang bukan masjid atau mereka melakukan dengan kelompok-kelompok pertemuan kecil atau yang tidak selalu dengan pengajian, atau pertemuan-pertemuan tertentu yang bersifat kerohanian .Para Kiai mengerti itu, tempat ibadah jelas

tidak bisa, tetapi kan pertemuan-pertemuan itu kan tidak dilarang yang penting kan tidak ditempat ibadah. Bisa jadi dengan percakapan-percakapan kecil personal dengan tokoh agama lain. dan itu terjadi.” (wawancara pada 15 Februari 2021)

Karena kampanyenya yang santun dan sesuai dengan aturan yang ada serta kehidupan sehari-hari yang penuh kesederhanaan, membuat banyak orang bersimpati pada para kiai. Karena itu, ketika ada pihak pasangan 02 (Prabowo Subianto-Sandiaga Mien Uno) berkata jelek kepada kiai, dukungan kepada Prabowo Subianto- Sandiaga Mien Uno semakin menurun di Jawa Timur.

Keberadaan para kiai di Kubu Jokowi-Ma’ruf Amin, semakin penting perannya, tidak hanya untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, tetapi juga untuk membuat suasana lebih harmonis di Jawa Timur pasca pemilihan presiden. Dalam hal ini kiai mempunyai tugas untuk melakukan pendekatan ke elit politik atau tokoh agama pendukung pasangan Prabowo Subianto-Ma’ruf Amin untuk tidak melakukan gugatan pengadilan setelah pemilihan presiden berakhir.

Memang sebagian besar kiai di Jawa Timur mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin, walaupun begitu terdapat juga kiai yang mendukung Prabowo Subianto- Sandiaga Mien Uno, khususnya yang berada di Madura dan Sitobondo. Karena itu di 3 kabupaten di Pulau Madura, yaitu di Sampang, Pamekasan dan Sumenep, pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin mengalami kekalahan. Selain itu di Kabupaten Sitobondo, Pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin tidak mendapatkan dukungan yang banyak dari pemilih. Pasangan Jokowi -Kiai Ma’ruf di Pulau Madura mengalami kekalahan dari Prabowo Subianto-Sandiaga Mien Uno. Dalam hal itu, hanya di Kabupaten Bangkalan Jokowi dan Kiai Ma’ruf Unggul. Seperti yang di realize KPU Provinsi Jawa Timur, Paslon 01 memperoleh suara 440.129 dan paslon 02 sebesar, 322.131 . Di kabupaten Sampang Paslon 01 memperoleh 187. 189 sedangkan paslon 02 dengan suara 570.597, dan di Kabupaten Pamekasan Jokowi dan Kiai Ma’ruf memperoleh 102.931 dan Prabowo sandi sebesar 531.561 . Hasil di kabupaten Sumenep paslon 01 memperoleh 242.305 dan paslon 02 memperoleh 436.931. Sedangkan secara keseluruhan di Jawa Timur,

Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dapat memenangkan konstestasi dengan memperoleh suara 67 persen, perolehan tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan perolehan suara Jokowi sebesar 53 % pada pilpres 2019 di Jawa Timur.

Keberhasilan kiai dalam memenangkan Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, tidak bisa dilepaskan dari posisinya sebagai elit di masyarakat. Dalam perspektif teori elit, seseorang akan mudah untuk mempengaruhi orang lain karena status sosial yang tinggi di masyarakat (Pareto, 1973). Sebagai elit di masyarakat, Kiai dapat memainkan peran dalam panggung sejarah dan peristiwa penting.

Seseorang menjadi elit karena mempunyai pengetahuan di bidang tertentu (termasuk di bidang agama), integritas moral dan faktor keturunan (geneologi) (Mosca, 1973). Dalam hal tersebut, karena mempunyai kedalaman ilmu agama dan integritas moral, kiai dapat menjadi vote getter dalam pemilihan presiden (pilpres) 2019. Terutama integritas moral dalam arti kemampuan memahami kepentingan masyarakat menjadikan kiai sebagai elit politik, dapat menjadi panutan bagi santri dan masyarakat dalam momentum politik .

Sebagaimana yang dikatakan Pareto, elit tidak saja berada dalam jabatan formal, tetapi ia bisa menjadi tokoh informal. Dalam hal perspektif Pareto, pengaruh bisa elit informal dalam hal tertentu lebih besar daripada elit formal, kekuasaan informalnya mampu menjangkau masyarakat untuk patuh melebihi batas-batas wilayahnya (Pareto 1973). Begitu pula yang terjadi pada kiai, pengaruhnya bisa melebihi pejabat pemerintahan di daerah dan menyebar melintasi kota, seperti para Kiai Lirboyo dan Tebu Ireng. Kharisma yang dimiliki dapat menjadikan fatwanya (instruksi) dapat dipatuhi oleh santri dan masyarakat di Jawa Timur.

Menurut Pareto, pengaruh elit terhadap massa dapat diperoleh tanpa paksaan dan intimidasi, begitu pula yang dilakukan oleh kiai, keberhasilannya “memikat hati” pemilih tidak dilakukan dengan menyebar kegaduhan dan kebencihan, tetapi dilakukan dengan kerendahan hati dan memberi informasi yang sesuai dengan kenyataan.

Karena hal tersebut, apa yang dinyatakan oleh kiai diyakini sebagai kebenaran oleh pemilih dalam pilpres 2019.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Turmudi, kiai mempunyai kelebihan dalam peran dan fungsinya sebagai pemimpin pesantren (Kiai Pesantren), membina kejiwaan umat (Kiai Tarekat), sebagai aktor politik (Kiai Politik) dan aktif dalam berdakwah (Kiai Panggung) (Turmudi, 2004). Karena 4 (empat) peran dan fungsinya tersebut memudahkan kiai untuk mempengaruhi santri dan masyarakat secara persuasif dalam setiap momentum politik, termasuk pemilihan presiden 2019 di Jawa Timur.

Kesimpulan

Kiai menjadi aktor politik penting dalam pemilihan presiden 2019 di Jawa Timur, Indonesia. Kiai telah menunjukkan keberhasilannya memenangkan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dengan perolehan suara signifikan sebesar 67 persen suara di Provinsi Jawa Timur. Perolehan suara Jokowi meningkat 14 persen dibandingkan perolehannya pada Pilpres 2019 di Jawa Timur. Selain memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin, para kiai di Jawa Timur berhasil meminimalisir terjadinya berita bohong (hoax), menyebarkan kebencian dan membuat politik identitas yang diusung oleh pihak tertentu kurang berhasil mempengaruhi pemilih. Politik identitas dalam arti politik yang menggunakan simbol dan narasi agama untuk kepentingan politik dimunculkan oleh pihak-pihak yang tidak suka Jokowi terpilih kembali sebagai Presiden Indonesia. Keberhasilan kiai dalam memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin dan mampu melawan politik identitas, tidak lepas dari posisinya sebagai elit di masyarakat. Karena sebagai elit, mudah bagi kiai untuk berkomunikasi secara politik dengan semua lapisan masyarakat. Melalui komunikasi ini, kiai lebih mudah mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan politik. Kiai mendapatkan posisinya sebagai elit di masyarakat, karena beberapa hal, antara lain kedalaman ilmu agama, integritas moral dan kepekaan dalam memecahkan masalah yang dialami warga. Hal-hal tersebut membuat kiai menghormati dan menuruti instruksinya oleh warga (pemilih). Oleh karena itu, ketika

kiai diolok-olok oleh lawan politik, otoritasnya meningkat dan lawan politiknya semakin antipati dari masyarakat.

Referensi

- Alfirdaus, L. K. (2014). Islam and local politics: In the quest of kiai, politics, and development in Kebumen, 2008-2010. *Al-Jami'ah*, 51(2), 279–309. <https://doi.org/10.14421/ajis.2013.512.279-309>
- Anshori. (2021). Interview with author on 20 May. Cape Town (Cassette recording in possession of author)
- As'ad.Z.A. (2021). Interview with author on 17 March. Cape Town (Cassette recording in possession of author)
- Chalik, A. (2016). Elite Lokal Yang Berbasis Pesantren Dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur. *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, 23(2), 364. <https://doi.org/10.19105/karsa.v23i2.744>
- Fealy, G., & Bush, R. (2014). The Political Decline of Traditional Ulama in Indonesia. *Asian Journal of Social Science*, 42(5), 536–560. <https://doi.org/10.1163/15685314-04205004>
- Hadiz, V. R. (2019). The “Floating” Ummah in the Fall of “Ahok” in Indonesia. *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia*, 7(2), 271–290. <https://doi.org/10.1017/trn.2018.16>
- Ismail, F. (2011). The nahdlatul ulama: Its early history and contribution to the establishment of Indonesian State. *Journal of Indonesian Islam*, 5(2), 247–282. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2011.5.2.247-282>
- Ma'arif, S. (2010). Pattern of Patron-Client Relationship Kiai And Santri In Pesantren. *Ta'dib*, 15(2), 273–295.
- Madjid,H. (2021). Interview with author on 18 June. Cape Town (Cassette recording in possession of author)
- Mietzner, M. (2018). Fighting Iliberalism with Iliberalism: Islamist Populism and Democratic Deconsolidation in Indonesia. *Pacific Affairs*, 91(2), 261–282.
- Mietzner, Marcus, & Muhtadi, B. (2020). The myth of pluralism: Nahdlatul Ulama and the politics of religious tolerance in Indonesia. *Contemporary Southeast Asia*, 42(1), 58–84. <https://doi.org/10.1355/cs42-1c>
- Mosca, G. (1973). The Varying Structure of The Ruling Class. In E. E. Etzion, Amita & Halevi (Ed.), *Social Change* (p. 211). Basil Books Inc Publishers.

- Muharam, M., & Marijan, K. (2020). *Social Media and the 212 Islamic Movement*. 29. <https://doi.org/10.4108/eai.1-10-2019.2291677>
- Pareto, V. (1973). The Life Cycle Of Cultures. In E. E. Etzioni, Amita & Halevi (Ed.), *Social Change* (p. 26). Basil Books Inc Publishers.
- Pribadi, Y. (2014). Religious networks in Madura pesantren, Nahdlatul Ulama and Kiai as the core of santri culture. *Al-Jami'ah*, 51(1), 1–32. <https://doi.org/10.14421/ajis.2013.511.1-32>
- Ralibi, O. (2021). Interview with author on 15 February. Cape Town (Cassette recording in possession of author)
- Ridwan, B., Syahputra, I., Tarigan, A. A., Siregar, F. A., & Nofialdi. (2019). Islam Nusantara, ulemas, and social media: Understanding the pros and cons of Islam Nusantara among ulemas of West Sumatera. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 9(2), 163–188. <https://doi.org/10.18326/IJIMS.V9I2.163-188>
- Roy Purwanto, M., Mukharrom, T., & Munjin Nasih, A. (2019). Inclusive, Exclusive, Radical and Nahdlatul Ulama. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. *Www.Ijicc.Net*, 9(10), 94–103. www.ijicc.net
- Roziqi. (2021). Interview with author on 17 April. Cape Town (Cassette recording in possession of author)
- Setiyani, W. (2020). The exerted authority of kiai kampung in the social construction of local islam. *Journal of Indonesian Islam*, 14(1), 51–76. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2020.14.1.51-76>
- Stake, R. (2011). Studi Kasus Kualitatif. In Y. S. Denzin, Norman K & Lincoln (Ed.), *The Sage Handbook of Qualitatif Research* (pp. 479–495). Pustaka Pelajar.
- Tan, C. (2014). Educative Tradition and Islamic School in. *Journal of Arabic and Islamic Studies*, 14(May 2010), 47–62.
- Turmudi, E. (2004). *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*. LKIS.